

NEGARA SEKULER
PERSPEKTIF JARINGAN ISLAM LIBERAL
DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ABDUL BASITH
NIM: 02361693

PEMBIMBING:

1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag
2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M. Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009

ABSTRAK

Negara merupakan proses panjang dari sejarah kemanusiaan, dimana interpretasi dan cakupannya selalu berkembang sesuai perkembangan pola pikir manusia. Fenomena negara sekuler muncul disaat perjalanan sejarah manusia mulai menanyakan kembali kebenaran superioritas tertentu terhadap lainnya. Semangat baru ini menghancurkan tata nilai sosial baru beserta kekuasaan, termasuk di dalamnya keyakinan masyarakat. Sekulerisme secara politik merupakan pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Disatu sisi wacana sekularisme dianggap sebagai ideologi kaum kapitalis yang keluar dari fitrah manusia dan menjauhkan agama dari kehidupan. Sekularisme juga dianggap sebagai ide kufur. Yang berarti melaksanakan sistem ini merupakan melaksanakan sistem kufur. Menyeru sistem ini berarti mempropagandakan sistem kufur. Oleh karena itu tidak boleh mengembangkan atau mengambilnya dengan alasan dan kondisi apapun. Di Indonesia wacana negara sekuler sampai saat ini belum selesai. Ada kesalahpahaman akan arti sekuler atau sekularisme. Jika sekuler diartikan sebagai sistem yang anti agama, atau lebih jauh lagi anti Islam, dengan definisi ini, tak heran jika istilah sekuler ini menjadi hal yang menakutkan.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berdasarkan buku-buku sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologis-historis yang menyelidiki aspek kehidupan sosial masyarakat. Penyusun mendeskripsikan perdebatan dan pemaknaan tentang negara sekuler di tingkatan akademisi dan kelompok-kelompok sosial tertentu baik dalam wilayah teori maupun prakteknya.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Negara sekuler dalam perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Walaupun secara historis mereka lahir di dalam tubuh agama Islam sendiri. Kerangka pemikiran keduanya telah tersebar keseluruh penjuru dunia yang berimplikasi pada pemikiran-pemikiran generasi muda sekarang ini. Kontroversi pemikiran Negara sekuler yang muncul telah menimbulkan polemik besar yang cukup berkepanjangan di kalangan intelektual Muslim dan para penggagas pembangunan Islam. Akibat polemik tersebut muncul dua kelompok dikotomis dengan sederetan tokoh intelektual pendukungnya. Kelompok pertama, suatu kelompok yang menentang keras sekularisasi yang dianggap identik dengan sekularisme. Kelompok kedua, suatu kelompok yang menolak sekularisme sebagai suatu paham tertutup yang anti agama. Menurut kelompok reformis ini, sekularisasi diartikan sebagai upaya pembebasan masyarakat dari kehidupan magis dan tahayyul dengan melakukan desakralisasi alam. Adapun secara praktek, tidak ada negara yang sekuler dan anti agama. Terminologi “negara sekuler” mungkin sudah tidak populer di tanah air, karena sudah terlalu banyak kesalahpahaman atasnya. Seharusnya yang menjadi perhatian selanjutnya adalah bagaimana istilah sekuler tersebut disikapi dan dipelajari tanpa menyalahi norma-norma kebudayaan bangsa kita, sehingga terwujudlah apa yang menjadi angan dan cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Kesanalah negara modern bermuara.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Abdul Basith

Lamp :-

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Basith

N I M : 02361693

Judul : **“Negara Sekuler Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1430 H
19 Agustus 2009 M.

Pembimbing I

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M. Ag
NIP. 196810201998031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Abdul Basith
Lamp :-

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Basith

N I M : 02361693

Judul : "Negara Sekuler Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1430 H
19 Agustus 2009 M.

Pembimbing II

NURAINUN MANGUNSONG, SH., M. Hum
NIP. 197510102005012005



PERSELEJIAN

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP-009/58/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

Negara Sekuler Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Abdul Basith

NIM : 02361693

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Jum'at, 07 Ramadhan 1430 H/
28 Agustus 2009 M.

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP. 19681020 199803 1002

Pengaji I

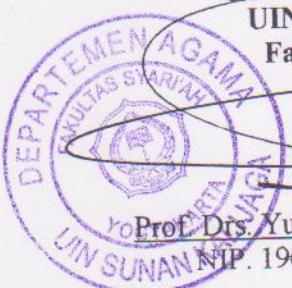
Budi Ruhiyatudin, SH., M. Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Pengaji II

Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 28 Agustus 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1001

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk:

Abah dan Mak Tercinta.

Saudara-saudariku.

YPTI el-FARABY

Serta Almamaterku UIN Sunan Kalijaga

Motto:

- *Setinggi apapun tempat yang kau daki, pastikan bahwa dirimu tidak lebih tinggi darinya. Biarlah orang yang menilai, kita tetap bekerja. Karena nilai seseorang diukur oleh seberapa banyak ia bisa bermanfaat bagi orang lain.*

- *Yaa Allah...Sesungguhnya kami telah menganiyaya diri kami sendiri, dan tanpa pengampunan dan rahmat-Mu maka kami termasuk golongan orang-orang yang merugi(al-Qur'an)*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ك	fâ'	f	ef
ڭ	qâf	q	qi
ڭ	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَعْدَدَةٌ	ditulis	Muta‘addidah
عَدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

<u>ف</u> <u>ع</u> <u>ل</u>	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	A fa'ala i žukira u yažhabu
----------------------------------	------------------------------------	--	--

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

<u>أَنْتُمْ</u> <u>أَعْدَتْ</u> <u>لَئِنْ شَكَرْتُمْ</u>	ditulis ditulis ditulis	A'antum U'iddat La'in syakartum
--	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur'ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Žawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينُ الْحَقِّ لِيُظَهِّرَهُ عَلَى الْدِينِ كُلِّهِ.
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
اللَّهُمَّ صَلُّ وَسِّلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ .

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum, selaku Ketua Jurusan PMH dan Bapak Fathurrahman, SH., M. Hum selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari’ah.

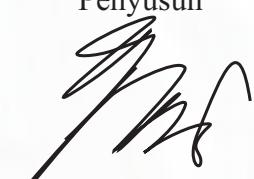
4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M. Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syari`ah, yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penyusun.
6. Abah dan Mak tercinta yang telah memberikan setiap sesuatu yang tak ternilai.
7. Saudara-saudariku tercinta yang selalu memberi motivasi dengan pertanyaan, "Kapan selesai skripsinya?", hingga akhirnya selesai juga skripsi ini.
8. LPM ARENA yang telah mengajari menulis dan memberikan ruang untuk berekspresi.
9. UKM MAPALASKA yang mengajari untuk selalu peduli dan lebih mencintai alam.
10. UKM Al-MIZAN yang selalu mengajak untuk bershawat, khususnya, Kancil, Farhan, Edi dkk.
11. UKM Teater Eska yang telah mengajari dalam proses berkesenian.
12. UKM Jama'ah Cinema Mahasiswa yang mengajari tentang perfilman.
13. Kawan-kawan KMPD yang mengajak untuk Cinta Tanah Air dan Budaya Indonesia.
14. KOPI (Kelompok Perkusi) Jogja yang mengajari musik perkusi dan warna nada.
15. Jajaran kos Berat dan Angker yang berinspirasi, khususnya Sireng, terima kasih atas pinjaman laptopnya juga Papi Suliz, Kitut, Surya, Muiz, kiki dkk.

16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak di atas, penyusun menghaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan balasan dari-Nya, Amien.

Akhirnya, semoga karya kecil ini dapat bermanfaat walaupun jauh dari kata sempurna. Dan hanya kepada Allah jualah penulis meminta pertolongan dan perlindungan, semoga mendapat ridho dan bimbingan dari Allah. Amin.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1430 H.
15 Agustus 2009 M.

Penyusun

Abdul Basith
NIM: 02361693

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
 BAB II TIPOLOGI NEGARA SEKULER DAN PROBLEMATIKANYA	
A. Pandangan Islam Terhadap Negara Sekuler	24
1. Pengertian Negara Sekuler.....	27

2. Sejarah pemikiran Sekuler	33
a. Aspek Keagamaan	41
b. Aspek Politik	42
c. Aspek Ekonomi	43
B. Kontroversi Sekularisme.....	51
C. Pendapat Intelektual Islam Terhadap Negara Sekuler	54

BAB III JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN HIZBUT TAHIRR INDONESIA

A. Jaringan Islam Liberal	61
1. Pengertian Islam Liberal.....	61
2. Sejarah Berdirinya	64
3. Tujuan dan Misi	68
4. Garis-garis Pemikiran	71
5. Pandangan Terhadap Negara Sekuler.....	77
B. Hizbut Tahrir Indonesia	80
1. Mengenal HTI.....	80
2. Sejarah Berdirinya	82
3. Tujuan dan Misi	85
4. Garis-garis Pemikiran	87
5. Pandangan Terhadap Negara Sekuler.....	88

BAB IV STUDI KOMPARASI PANDANGAN JARINGAN ISLAM LIBERAL DAN HIZBUT TAHIRR INDONESIA

A. Analisis Epistemologi	91
--------------------------------	----

1.	Jaringan Islam Liberal	92
2.	Hizbut Tahrir Indonesia.....	93
B.	Analisis Historis	94
C.	Analisis Perbandingan	95

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	98

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu kata yang mewakili identitas paling solid di dunia saat ini, sesolid dengan identitas manusia yang muncul secara otomatis sejak lahir. Mulanya sebutan negara tidak sepenting apa yang nilai-nilai modern gunakan saat ini,¹ bermula dari kerajaan purba atau sistem kekuasaan masa lalu yang diwakili oleh segolongan masyarakat tertentu, yang sesungguhnya hanya mewakili dominasi kekuasaan melalui dukungan kesetiaan dan tentara atau militer pada suatu wilayah tertentu.² Karena itulah masalah identitas warga negara bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi hegemoni kekuasaan pada golongan elit, seorang figur pemimpin dan keluarganya serta para pengikut dekatnya menguasai rakyat kebanyakan, bercita-cita membangun kerajaan, memperluas wilayah geografis, memungut pajak, sistem semacam ini belakangan disebut kerajaan.

¹ Sejarah Negara modern bisa kita baca melalui berdirinya Republik Perancis dan federasi Amerika, keduanya muncul dari situasi kesadaran akan persamaan hak sipil yang selama masa kerajaan tidak pernah didapatkan, Negara sendiri merupakan proses panjang dari sejarah kemanusiaan, di mana interpretasi dan cakupannya berkembang sesuai perkembangan pola pikir manusia. Lihat: Documents of American History (Virginia: Virginia Department of Education, 1999), bab declaration Of American Independents. Lihat pula: A Concise History of France (New York: Cambridge University Press, 2005) bab Medieval And Early Modern, dan Lynn Schler, History the Nation-State, and Alternative Narratives: An Example from Colonial Douala (NY: African Studies Review, 2005), hlm. 1-10.

² Sejarah purba menyebutkan bahwa kerajaan didahului oleh pola aristokrasi golongan tertentu, lihat: Shawn C. Knight, A Short History of Egypt, Part III: The New Kingdom and its Aftermath (Pittsburgh: Carnegie Mellon University Press, 2009), bab The Early Eighteenth Dynasty.

Sedangkan negara modern yang sekuler lahir di saat perjalanan sejarah manusia mulai menanyakan kembali kebenaran superioritas seorang manusia, kelompok tertentu, atau nilai-nilai tertentu terhadap yang lainnya. Semangat baru ini menghancurkan atau merubah tata nilai beserta kekuasaan di dalamnya, menciptakan tata sosial baru, termasuk di dalamnya keyakinan masyarakat. Revolusi orang-orang kebanyakan yang biasa disebut dengan rakyat muncul dalam kondisi semacam ini. Seperti revolusi rakyat Perancis, revolusi Industri di Inggris, revolusi Amerika, revolusi Komunis Rusia, menciptakan batasan yang spontan dan jelas antara negara masa lalu dan negara masa kini. Di kemudian hari, di belahan dunia lain, revolusi Cina, runtuhnya kekhalifahan dan kesadaran dunia ketiga atas kemerdekaannya sehingga melahirkan negara-negara dunia kedua dan ketiga, telah mengubah dunia menuju arah serta nilai baru yang tidak pernah dialami oleh peradaban manusia puluhan atau ratusan ribu tahun sebelumnya.³

Sekularisme muncul ketika masyarakat Barat mengalami kemunduran yang sangat hebat. Karena, cengkraman gereja (Kristen) yang kala itu melembaga begitu kuat. Otoritas gereja bukan hanya mengurus persoalan sosial dan ekonomi, namun juga menguasai wilayah politik. Sehingga kelembagaan gereja yang dijelaskan melalui kekuasaan (politik) ketika itu begitu menekan, mengekang dan arogan. Alih-alih gereja ingin menangani hampir segala aspek kehidupan di Barat ketika itu, namun ternyata campur

³ Kekuatan manusia menjadi sangat besar, kepasrahan terhadap lingkungan alamiah menjadi musnah perlahan, walau tidak menyeluruh, alam fikir manusia telah menggantikan keyakinan tentang kekuatan alam dan Tuhan, lihat kembali Shawn C. Knight, *Berakhirnya Alam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991) hlm. 153-157.

tangan kaum agamawan ini malah membawa masyarakat Barat kepada lembah kemunduran. Sehingga wajar masyarakat Barat menyebut masa pertengahan ini, bagi mereka adalah “zaman kegelapan” (*the dark ages*). Akhirnya, masyarakat Barat merasa trauma. Mereka melakukan protes dan menunjukkan sikap antipati. Mereka berkesimpulan bahwa untuk melakukan perubahan mau tidak mau harus melakukan “kudeta” besar-besaran kepada otoritas dan kekuasaan gereja. Karena itu mereka lalu mulai meluncurkan ide, agar kekuasaan gereja dibatasi. Tepatnya, agar agama sekedar menjadi masalah pribadi masing-masing, tanpa harus dikungkung oleh batas-batas dogma agama dari gereja. Otoritas gereja tidak boleh masuk ke wilayah otoritas negara (politik). Hingga muncullah renaisans di Perancis sebagai pertanda sekularisasi di Barat, terutama dalam bidang politik. Dimana wilayah kekuasaan kaisar dan pendeta harus jelas dan dibatasi wilayah geraknya.⁴

Di Indonesia wacana negara sekuler belum selesai. Masih dipersoalkan apakah Indonesia negara sekuler atau negara agama. Banyak orang menganggap Indonesia sebagai negara sekuler. Misalnya, Manning Nash mengatakan Malaysia dan Indonesia adalah *Islamic nations but secular states* (*Fundamentalism Observed*, 1991). Charles D Smith menulis *Indonesian state is officially secular yet sponsors secular and religious educational systems and maintains secular and religious (shariah) courts (Secularism*, 1995). Mun'im A Sirry, juga menyebut Indonesia sebagai negara sekuler. Mereka terjebak dalam dikotomi negara agama-negara sekuler. Padahal, dikotomi ini

⁴ <http://pwkpersis.wordpress.com/2008/05/03/menimbang-politik-sekuler/>, akses 9 agustus '09

menafikan kompleksitas dan dinamika hubungan agama dan negara yang khas Indonesia. Dikotomi sekuler-religius adalah unsur ideologis dalam wacana modernitas Barat. Itu berfungsi tidak hanya dalam persepsi Barat terhadap non-Barat, tetapi juga dalam cara Barat memahami dirinya sendiri.⁵

Apabila Indonesia adalah negara sekuler, maka negara tidak memberi bantuan apa pun kepada lembaga agama. Departemen Agama harus bubar, dualisme peradilan (negeri dan agama) harus dihilangkan karena negara sekuler meniscayakan tata hukum sipil yang seragam (*uniform civil code*). Belum lagi berbagai kebijakan seperti perayaan hari-hari besar agama, regulasi tanah-tanah wakaf, pengurusan haji, lembaga-lembaga pendidikan agama seperti IAIN dan madrasah, pembangunan sarana agama seperti *Islamic centre* oleh pemerintah, undang-undang zakat, labelisasi halal bagi makanan dan minuman, dan sebagainya.⁶

Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai corak pemikiran Islam Indonesia yang tidak bisa dilewatkan begitu saja dengan kebijakan politik pembangunan di bawah rezim Orde baru, yang dirasa oleh intelektual Islam sangat memojokkan dan memarjinalkan kelompok Islam. Para cendekiawan muslim mencoba mengangkat beberapa tema yang menjadi isu sentral antara lain, Islam dan Negara Nasional, Islam dan Keindonesiaan dan lain-lain.

Kemudian, pada awal tahun 1970-an telah lahir suatu gerakan yang disebut dengan gerakan Neo-Modernisme yang merupakan embrio dari ide-ide

⁵ Mun'im A Sirry, "Islam, Sekulerisme, dan Negara", *Kompas* 13/2/2002.

⁶ *Ibid.*

Islam Liberal dengan kebangkitan yang signifikan selama kurang lebih 25 tahun di wilayah pemikiran intelektual Islam di Indonesia, yang menurut Greg Barton, memiliki karakter khas dan berbeda dengan kebangkitan Islam di wilayah Islam lain.⁷

Perkembangan selanjutnya intelektual Neo-Modernisme Islam di Indonesia ini mengembangkan basis intelektual yang terbuka dan mampu menyerap sambil berdialog dengan nilai-nilai positif dari pola pikir modernitas seperti demokrasi, kesetaraan, pluralisme dan ide-ide progresif dengan cerdas. Di sisi lain bersifat kreatif karena perkembangan intelektual Islam di Indonesia ini berhadapan dengan struktur sosial-politik konstruksi negara yang tertutup sehingga tidak kondusif bagi keterbukaan dan ruang publik yang bebas dari tekanan hegemoni negara Orde Baru yang begitu kuat-despotik.⁸

Kemunculan gerakan kebangkitan pembaharuan di dunia Islam sekitar pada saat itu adalah gerakan liberal. Liberal disini memiliki makna ganda, yaitu liberasi atau pembebasan kaum muslim dari imperealisme Eropa yang melanda hampir di seluruh dunia Islam. Makna lain dari liberal adalah liberasi atau pembebasan kaum muslim dari cara berfikir dan berperilaku keagamaan yang menghambat kemajuan,⁹ yang merupakan reaksi dari sejumlah ulama dalam menyikapi hal-hal yang mengotori ajaran Islam yang *tauhidiyah*

⁷ Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, (Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999), hlm. 1-2.

⁸ Airlangga Pribadi dan M. Yudhie R. Haryono, *Post Islam Liberall: Membangun Dentuman. Mentranslasi Eksperimentasi*, (Bandung: Gugus Press, 2002), hlm. 213.

⁹ Zakiyuddin Baidhawy, *Ambivalensi agama, konflik dan Nir Kekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 221.

ilahiyah akibat dari pengaruh budaya lokal dan budaya asing yang bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak sejalan dengan syari'at Islam.

Salah satunya Ulil Abshar Abdalla mencoba melihat sisi lain Islam, dan mencoba menawarkan gagasan negara sekuler. Ulil sangat kreatif mengemas Islam menjadi sebuah suguhan intelektual yang baru dan menarik, ditambah dengan kepiawaiannya dalam menentukan dixi, kecermatan dan ketajamannya dalam memotret fenomena keagamaan, konsistensinya dalam menolak jenis-jenis tafsir keagamaan yang hegemonik, tidak pluralis, anti demokrasi yang potensial menggerogoti persendian Islam sendiri, sehingga ia merasa tidak *confortable* dengan model tafsir yang demikian,¹⁰ serta bermodal dengan keberaniannya yang secara kritis mencoba memanfaatkan media massa skala nasional untuk mempublikasikan gagasan kontroversialnya, maka banyak muncul "kesalah-pahaman" berbagai pihak menyangkut fikiran keIslamannya. Tidak heran jika Ulil diposisikan sebagai salah satu tokoh Islam Liberal di Indonesia.

Di satu sisi, kelompok Islam politik Hizbut Tahrir yang berskala internasional dan tersebar di berbagai negara, begitu gencar menawarkan konsep *Khilafah Islamiyah*, dan bercita-cita mendirikan negara Islam, yakni penerapan syari'at Islam di berbagai kehidupan serta meletakkan dan memilih

¹⁰ Abdul Moqsith Ghazali (Ed.), *Ulil Abshar Abdalla: Menjadi Muslim Liberal*, (Jakarta: Nalar, 2005), hlm. IX.

Islam sebagai ideologi,¹¹ juga berkembang di tengah-tengah realitas penduduk Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa.

Hizbut Tahrir muncul sebagai sebuah partai politik Islam ideologis, gerakan ini didirikan oleh Syekh Taqiqudin an-Nabhani pada tahun 1953 Masehi pada saat pemerintahan Khilafah Islamiyah mengalami kemerosotan. Hizbut Tahrir memandang Islam bukan sekedar identitas kultural dan ritual, akan tetapi juga ideologi yang mencakup *siyashah wa daulah*. Oleh karena itu keberadaan sebuah negara dan pemerintahan sebagai konsekuensi dari sebuah ideologi. Sejalan dengan ini Hizbut Tahrir menyatakan bahwa falsafah kebangkitan yang hakiki sesungguhnya berawal dari adanya sebuah ideologi (*mabda'*) yang menggabungkan fikiran (*fikrah*) dan metode (*thoriqoh*) dan ideologi tersebut adalah Islam.¹²

Dalam tubuh agama Islam di Indonesia inilah, dua kelompok ini tumbuh, sebagian dari nilai-nilai keduanya dimenangkan secara struktural oleh kelembagaan agama, dan sebagian nilai dari kedua kelompok agama ini tumbuh secara diaspora sebagai kelompok yang eksklusif atau militan, walau keduanya tidak termasuk dalam masyarakat Islam kebanyakan yang tumbuh di Indonesia.

Berangkat dari kompleksnya diskursus tentang negara sekuler itulah, penelitian ini menjadi sangat signifikan untuk dilakukan karena menyuguhkan pemikiran yang berlawanan antara Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir di

¹¹ Taqiqudin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, trj. Zakaria, dkk (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 5.

¹² *Ibid.*, hlm. 5.

Indonesia dalam memahami negara sekuler tersebut. Hal ini juga karena masing-masing kelompok tersebut memiliki akar sejarah yang berbeda. Sehingga menimbulkan cara pandang yang berbeda pula.

Sejauh pengamatan penyusun, sangat sedikit sekali penelitian yang membahas tentang negara sekuler yang ada di daftar koleksi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Ini secara tidak langsung membuktikan bahwa studi tentang kenegaraan tidak begitu diminati oleh mayoritas mahasiswa. Juga bisa dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara sudah ditinggalkan oleh warga dan generasi mudanya sekarang ini.

Sehingga dalam penelitian ini penyusun tertarik untuk memilih judul "Negara Sekuler Perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia" sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Walaupun pada akhirnya karya ini akan jauh dari sempurna. Tapi setidaknya ini bisa merangsang untuk berfikir tentang masa depan dan ide-ide kenegaraan.

Negara modern sendiri yang mengurus masalah sekuler (urusan antara manusia dengan manusia) termasuk di dalamnya negara yang mengurus kelembagaan agama manusia akan terus menjadi perdebatan sengit antara kaum yang membebaskan alam fakir dalam tujuan cita-cita manusia, dengan kelompok yang dengan tulus mengikuti keyakinan Illahi yang diyakininya secara penuh beserta cita-cita dan perjuangan nabinya ribuan tahun yang lalu.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pemahaman Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap negara sekuler.
2. Bagaimana implikasi pemahaman Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir tentang negara sekuler terhadap realitas bangsa Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan pemahaman negara sekuler dalam perspektif organisasi Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 - b. Ingin menjelaskan lebih jauh bagaimana implikasi perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir tentang Negara sekuler terhadap realitas bangsa Indonesia.
2. Kegunaannya adalah:
 - a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum dan kenegaraan.
 - b. Menambah khazanah literatur keilmuan dan keislaman.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang negara sekuler melalui perbandingan dua organisasi Indonesia yang masing-masing memiliki *ontology* terhadap sumber-sumber

Islam namun dengan versi yang terkadang bertolak belakang, merupakan kajian literal teoritis, yang mencakup perdebatan filosofis dalam memahami nilai-nilai sejarah dan substansial.¹³

Akan tetapi sejauh pengamatan penyusun, belum ditemukan adanya karya tulis yang membahas tentang negara sekuler dalam perspektif Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir. Meskipun demikian, telah ada karya tulis yang membahas negara sekuler secara tersendiri seperti, buku-buku Leonard Binder, menjadi referensi yang memiliki kekayaan luar biasa dalam melihat Islam Liberal baik secara historis maupun teoritis, dasar-dasar teoritis dibangunnya liberalisme Islam yang ternyata jauh-jauh hari telah ada di pusat jantung Islam, arah perlawanan terhadap kemapanan negara dan lembaga keagamaan menjadikan buku ini kaya akan pertanyaan makna arah pembangunan modern dan sendi terdalam Islam yang nyatanya secara dominan mengikuti pendiktean kekuasaan dan sejarah dokmatis negara modern atas lembaga-lembaga keagamaan. Akan tetapi buku tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai konsep-konsep negara sekuler.

Salah satu karya monumental yang ditulis oleh Munawir di sela-sela kesibukannya sebagai Menteri Agama adalah buku *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*.¹⁴ Secara umum dalam buku ini beliau

¹³ Karya ini mempersempit kajian konsep negara yang sangat luas melalui kajian negara sekuler dan hubungannya dengan agama yang terbatas dari dua organisasi Islam Indonesia, Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir Indonesia.

¹⁴ Munawir Syadzjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993),

mencoba menelaah konsepsi politik Islam yang berkembang di masa klasik dan masa modern.

Selanjutnya dalam buku ini Munawir mengajak para pembaca untuk melakukan kajian ulang tentang hubungan Islam dan tata negara atau politik, dengan sasaran utama menemukan jawaban tentang ada atau tidak adanya sistem politik dalam Islam: dan kalau misalnya ada, apakah masih relevan untuk kita terapkan pada zaman dan tingkat kemajuan kala kita hidup sekarang.

Dari pengamatan penyusun, secara umum terlihat dalam buku ini *mainstream* pemikiran Munawir lebih menekankan pentingnya hal-hal yang bersifat substansial daripada yang formal dan legal, baik secara keagamaan maupun sosial. Dari beberapa kritik yang disampaikan Munawir dalam bukunya tersebut terlihat bahwa beliau sangat berharap akan adanya sebuah sistem politik Islam yang lentur dan fleksibel dalam penerapannya sesuai dengan situasi dan kondisi aktual.

Demikian pula buku, *Relasi Islam dan Negara, Perspektif Modernis dan Fundamentalis*¹⁵ yang ditulis oleh Kamaruzzaman Bustaman. Tetapi buku ini hanya membahas pada pemetaan aliran atau tipologi pemikiran Natsir sebagai modernis dan a—Maududi sebagai fundamentalis. Begitu pula dengan buku “*Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*”,¹⁶ yang ditulis oleh Ahmad Suhelmi. Ia hanya mengeksplorasi pandangan-pandangan politik

¹⁵ Kamaruzzaman Bustaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang: Indonesiatera, 2001)

¹⁶ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir* (Jakarta: Teraju, 2002).

Muhammad Natsir (Nasionalis-Religius) yang kemudian dibenturkan dengan Soekarno (Nasionalis-sekuler) terutama konsep pendasaran negara Indonesia terhadap agama Islam.

Sementara itu, yang menulis tentang pemikiran negara sekuler Jaringan Islam Liberal diantaranya, Abdul Moqsith Ghazali, (Ed.), *Ulil Abshar Abdalla: Menjadi Muslim Liberal*, dan Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad wahib dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, dan masih banyak lagi referensi berjudul Para Pemikir Bebas Islam, didalamnya, menusuk jantung utama Islam yang merupakan pertanyaan filosofis aqidah Islam yang selama ini mapan, yang nyatanya telah jauh-jauh hari dipertanyakan oleh intelektual muslim masa lampau, di dalamnya mencakup karya-karya Ibn rawandi dan Abu Bakr ar Razi, tentang doktrin kontroversi atas nama agama, tentang bagaimana agama telah dilampui oleh kekuasaan elit tertentu, bagaimana keyakinan pada dasarnya merupakan kepanjangan dari siapa yang berkuasa pada saatnya.

Buku selanjutnya tentang Hizbut Tahrir adalah yang di tulis langsung oleh pendirinya Taqiudin an-Nabhani yang lahir di Libanon,¹⁷ dan mendirikan organisasi setingkat partai ini tahun 1953 da al Quds, Palestina. Di dalam buku ini Taqiudin memaparkan tantangan-tantangan umat Islam pada zaman modern yang buktinya menjadi kenyataan saat ini, tantangan Islam merujuk pada buku ini adalah pernyataan pernyataan golongan liberal yang terpengaruh

¹⁷ Taqiudin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, Terj. Zakaria, dkk (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

oleh pemikiran filsafat Barat (Yunani) dan Persia (Iran) dimana telah mengobok-ngobok jantung iman umat Islam, interpretasi yang memberatkan pada akal, modernism yang dipandang sebagai cita-cita dan sumber loyalitas, telah menciptakan umat yang terpecah belah tanpa pemimpin.

Taqiudin memberi tekanan bagi masa depan Islam yang hanya bisa dibangun melalui sistem jaringan sesuai dengan sejarah historis kekhilafahan dimana di dalamnya Islam menciptakan keadilan sesuai dengan pesan surgawi, dimana kehidupan nabawi dapat tercapai, konsep ini oleh Taqiudin diulang berkali-kali dalam term Daulah Khilafah, Negeri yang sangat luas yang mencakup mayoritas umat Islam melalui sistem Khilafah.

Referensi berikutnya adalah konsep negara Indonesia yang diyakini oleh banyak golongan Islam telah menerapkan substansi dari nilai-nilai Islam, dalam buku yang berjudul Membangun Integrasi Bangsa, karangan Qodri Azizi, dikemukakan nilai-nilai substansi Islam yang telah mencakup dalam tata kenegaraan Indonesia, teloransi, kebebasan berfikir, berpendapat, demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, serta pola kelola pemerintahan yang sesungguhnya telah sesuai dengan syari'ah Islam.

Menggambarkan bagaimana masyarakat madani hanya bisa dibentuk melalui sistem yang bertahap sesuai dengan gambaran kontekstual pengetahuan masyarakat, menuju *baldatun toyibah*, adalah masyarakat sebagai penentu masa depan bangsa, adalah masyarakat yang lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah, melalui persamaan hak di dalam hukum, pengelolaan negara akan sesuai dengan asas-asas Islam.

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “Gagasan Islam Liberal”, yang ditulis oleh Abdul Rouf mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada Tahun 1999,¹⁸ dalam skripsi tersebut hanya membahas singkat gagasan Islam Liberal secara umum di Indonesia. Lalu, “Bentuk pemerintahan Hizbut Tahrir, yang ditulis oleh Novia Anggraini mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2000”¹⁹ dalam skripsinya pembahasannya terbatas pada ideologi saja dan tidak ada pembahasan mengenai negara sekuler.

E. Kerangka Teoretik

Menyinggung tentang hubungan negara dan pemerintahan dengan agama sampai saat ini memang masih menjadi perbincangan yang menarik dan selalu aktual. Permasalahannya adalah, Islam sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar umat manusia tidak menetapkan konsep secara secara eksplisit, bagaimana konsep negara dan bentuk pemerintahan Islam yang sebenarnya.²⁰

Sepanjang sejarah Islam sampai sekarang ini pemikiran-pemikiran politik Islam kontemporer terdapat tiga golongan yang disimpulkan menurut Munawir Syadzali, terbagi atas tiga aliran. *Aliran pertama*, yang berpendirian bahwa Islam adalah agama yang paripurna dalam arti lengkap dengan segala

¹⁸ Abdul Rouf, “Gagasan Islam Liberal di Indonesia”, *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (1999)

¹⁹ Novia Anggarini, “Bentuk Pemerintahan Hizbut Tahrir”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga (2000).

²⁰ Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 13.

petunjuk bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem pemerintahan, dengan merujuk pola politik semasa al-Khulafa al-Rasyidun sebagai model. Ternyata telah mendasarkan keyakinannya atas asumsi atau observasi yang salah dan tidak mampu menyajikan konsepsi yang utuh yang dijanjikan. Adapun konsepsi yang dikemukakan oleh sementara pemikir dari aliran ini menurut Munawir, sarat dengan kontradiksi dan sukar dilaksanakan pada situasi dan kondisi sekarang, terutama untuk masyarakat yang majemuk.

Demikian pula halnya *aliran kedua* yang berkeyakinan bahwa Islam adalah sama sekali sama dengan agama-agama yang lain, dan Nabi Muhammad adalah Nabi biasa tanpa misi untuk mendirikan agama. Atas pijakan dan alur argumentasi dari aliran ini ternyata juga lemah dan rapuh serta mengandung cukup banyak kontradiksi dan inkonsistensi.

Akhirnya setelah memperhatikan kelemahan-kelemahan mendasar pada kedua aliran tersebut, Munawir sampai pada kesimpulan untuk cenderung mengikuti *aliran ketiga*, aliran yang pada satu sisi menolak anggapan bahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik, dan pada sisi lain tidak setuju dengan anggapan bahwa Islam adalah agama yang sama sekali sama dengan agama-agama lain , yakni aliran yang percaya bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang kita temukan dalam al-Quran, yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman

dengan zaman yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain.²¹

Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut para warga negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolitis dari kekuasaan yang sah.²²

Untuk mengatur pola hubungan seperti itu, yakni pejabat dan rakyat, diperlukan sistem politik yang disepakati bersama. Sistem politik, menurut Dahl dapat didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan –secara cukup menonjol-kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.²³

Negara terbentuk karena kesamaan nasib dan cita-cita, pada awalnya lebih merupakan kesatuan suku dan agama yang mendominasi dalam suatu masyarakat yang menjaga norma dan aturan sosial masyarakat. Namun perkembangan pengertian negara sewaktu-waktu dapat berubah, kesatuan agama dan etnis pada akhirnya luntur karena munculnya politik demokrasi, multikultur dan multi ras dalam suatu negara, selain disebabkan sejarah akopasi, ekspansi dan migrasi antar negara. Pada akhirnya Negara sebagai penjaga moral dan hukum berkembang dan berubah hanya untuk menjadi pengatur atau regulator dari kebebasan individu dan hak asasi setiap

²¹ Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

²² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta; Gramedia, 2000) hlm. 40.

²³ Robert A. Dahl, *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan (Jakarta: Bumi aksara, 1994), hlm. 4.

warganya.²⁴ Dalam sejarah Eropa pertengahan, runtuhnya hegemoni para bangsawan di awal abad pencerahan Eropa serta lemahnya kekuasaan gereja yang pada abad-abad sebelumnya sangat dominan memunculkan perubahan besar pada sendi-sendi kenegaraan wilayah itu, sejak itu dan seterusnya.

Pada kenyataannya perkembangan sejarah dunia tidak berlangsung absolut, dan serempak, selalu secara parsial bahkan individual. Timur tengah, sebagai basis kekuasaan Islam, khalifah dengan konsep lama yang memadukan kekuasaan dunia-akhirat serta menekankan kemutlakan raja masih berlangsung hingga dua dekade awal abad dua puluh, konsep khalifah mengalami keruntuhan saat harus menghadapi perubahan besar dari peradaban barat atau Eropa yang merupakan semacam salah satu oposisi abadinya. Ketika jaringan struktural pemerintahan tersebut rapuh, dan ketertinggalan tidak bisa disusul secara cepat, maka kekuatan rakyat dan asing menggantikan pemerintahan sehingga munculah suksesi massa.²⁵ Kekhalifahan yang berlangsung selama enam abad akhirnya runtuh, terpecah dalam berbagai negara modern, bermacam sistem pemerintahan yang merekatkan dirinya

²⁴ Pola Negara akan terus berkembang yang pada tujuannya menuju kebebasan seluas-luasnya bagi individu beserta harkat dan cita-citanya, lihat: Gerhart Raichle, *Asas-Asas Kebijakan Sosial Liberal* (Potsdam, Friedrich-Naumann-Stiftung, 1999), bab Kebebasan dan Keamanan

²⁵ Suksesi massa timbul karena sistem pemerintahan rapuh, dimana golongan besar kehilangan akses terhadap nilai dan peri kehidupan kenegaraannya, sehingga menimbulkan ketidak stabilan dan pergolakan massa, di negara miskin dan berkembang di mana struktur social belum cukup mapan, pergolakan massa ditekan dengan kekuatan junta militer dan pengawasan super ketat rakyatnya, lebih lengkap, lihat kembali, *A Concise History of France* (New York: Cambridge University Press, 2005) bab Revolution and Empire halm 99-32.

berdasarkan arus nasionalisme, suatu idiom yang masih asing bagi dunia Islam waktu itu.²⁶

Memasuki abad dua puluh satu, ketika negara-negara Islam memiliki bentuk dan kepentingan masing-masing, beberapa organisasi trans nasional menginginkan adanya keterhubungan kembali atas nama kesamaan agama dan menolak keberadaan nasionalisme serta sistem demokrasi adaptatif yang tumbuh di negara-negara sekuler muslim, kesamaan dalam dominasi pemeluk Islam serta kemiripan sejarah masa lalu menjadi pendorong gerakan ini, membentuk sistem pemerintahan khalifah dengan mencontoh praktik kekhalifahan pada masa nabi sesuai versi mereka.²⁷

Bersamaan dengan itu, satu kelompok yang lain lintas negara memahami pemerintahan sekuler Islam sebagai sesuatu yang substantive dalam ajaran Islam, persamaan setiap orang untuk berpolitik, kebebasan berfikir dan berkeyakinan, perlindungan minoritas, menjadi kunci dari moral pemerintahan yang Islami. Mereka menolak paradigma satu agama satu penafsiran serta satu kelembagaan. Gerakan ini mengarahkan agama pada wilayah pengalaman individual yang privat dan personal. Menolak peraturan

²⁶ Nasionalisme adalah faham yang baru berkembang di abad pencerahan, negara dalam hal ini di jaman pertengahan hanya sebuah entitas kekuasaan, yang mengatur pola hidup rakyat dalam wilayah tertentu, itu mengapa penjajahan dan serangan tiba-tiba adalah hal yang wajar di dalam sejarah kerajaan lampau.

²⁷ Lihat kembali: Taqiuddin an-Nabhani, *Concepts of Hizb ut-Tahrir* (London: Khilafah Publications, 2008) hlm 11-16.

negara berdasar sumber-sumber agama dan menciptakan pemerintahan yang murni dan dialog rasional dan berkelanjutan.²⁸

Pada realitasnya kedua golongan ini ingin merubah orientasi pemerintahan Islam yang masih mengakomodir mereka secara setengah setengah. Keduanya harus menghadapi problem-problem umum yang terjadi di negara-negara muslim, kemiskinan, kebodohan, kesehatan, serta penguasa yang otoriter dimana segala aturan hanya mementingkan pihak berkuasa.

Kekhalifahan sendiri dalam hal ini diperjuangkan secara gradual oleh Hisbu Tahrir Indonesia (HTI) pada kenyataannya mengandung unsur-unsur yang membebaskan dan populis demokratik dalam ukuran-ukuran tertentu, sementara kolempok muslim berfikiran bebas dalam hal ini diwakili oleh gerakan Jaringan Islam Liberal (JIL) memiliki cita-cita Islam dengan nilai-nilai universal, yang mampu menyatukan bermacam perbedaan dan faksi-faksi yang tumbuh kuat di tubuh dunia Islam, yang selama ini menghambat kerjasama dunia Islam.²⁹

Konsep pemerintahan kedua golongan ini akhirnya harus realistik dalam menghadapi masalah-masalah sekuler yang urgen di hampir semua negara-negara muslim, niscaya bila setiap warga di negara yang mayoritas muslim adalah orang-orang berpendidikan, sejahtera, dan mendapatkan

²⁸ Ramy El-Dardiry, *Islam Encountering Enlightenment: Clash or Symbiosis?* (Enschede: University of Twente Press, 2005) sub bab Global Development In Islamic Thought.

²⁹ Adalah kepelikan yang terjadi di pusat Islam yaitu jazirah arab, dimana konflik ideologi, kepentingan dan realitas budaya sangat mempengaruhi pola pandang kerjasama masyarakat arab khususnya dan dunia Islam umumnya, lihat: <http://www.futureofmuslimworld.com/research/detail/the-crisis-of-the-arab-brotherhood>, data akses, 25 juni 2009

keadilan politik serta ekonomi dan budaya, maka cita-cita pan Islam dan liberalisme Islam di negara-negara sekuler Islam dapat berlangsung.³⁰

Dikarenakan kajian ini meneliti tentang pemikiran dan sudah barang tentu dalam waktu yang cukup lampau, maka penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan dalam mengungkap pemikiran mereka. Pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasa lalu, lebih dari itu, peristiwa-peristiwa tersebut di analisis dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintetis yang dapat memberi penjelasan mengenai aspek-aspek: a) bagaimana deskripsi peristiwanya, b) mengapa peristiwa itu terjadi, dan c) kemana arah peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.³¹

Dalam perkembangan penulisan sejarah, muncul sejarah deskriptif-analitis. Menurut Sartono Kartodirdjo, penulisan sejarah yang deskriptif-analitis ini berusaha menguraikan kausalitas, faktor-faktor kondisional dan determinan-determinan dari suatu peristiwa.³² Dalam sejarah analitis digunakan metode kritis dan konsep-konsep serta teori-teori ilmu pengetahuan

³⁰ Kesamaan aspirasi akan cita-cita kesejahteraan yang lebih realistik, akan mendorong kerjasama antar negara-negara Islam lebih erat, terutama ketertinggalan mereka dalam ekonomi dan pendidikan. Selain itu, dibukanya dialog antar anggota OKI, yang lebih meluas pada akhirnya akan menguatkan aspirasi akan cita-cita Islam yang sesungguhnya, yang tidak cukup termaktub dalam ranah symbol dan kekuasaan.

³¹ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 4-5.

³² Dikutip dari ahmad adaby Daeban, “Sebuah Pendekatan Sejarah Struktural dan Relevansinya untuk sejarah Nasional“ *Makalah* pada Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta, 16-19 Desember 1985 Yang Diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, hlm. 1-2.

untuk dipergunakan sebagai alat interpretasi terhadap fenomena sejarah, termasuk ilmu-ilmu sosial.³³

Ilmu sosial tersebut antara lain adalah sosiologi. Pra-anggapan perspektif sosiologis adalah concern-nya pada struktur sosial, konstruksi pengalaman manusia dan kebudayaan termasuk agama.³⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁵ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis-komparatif.³⁶

2. Pengumpulan Data

Karena kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya atau uraian pemikiran yang menyangkut kedua kelompok atau organisasi tersebut. Adapun buku-buku atau karya yang di

³³ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁴ Michael S. Northcott, “Pendekatan Sosiologis”, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS,1999), hlm. 267.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁶ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan utnuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang di teliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sesuatu sehingga hakikat objek dapat difahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

jadikan acuan adalah: *Concepts of Hizb ut-Tahrir*,³⁷ *Taqiudin an-Nabhani, Pembentukan Partai Politik Islam*, trj. Zakaria, dkk (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002),³⁸ Denny J. A, *Sebuah Teologi Untuk Negara Sekuler*,³⁹ dan beberapa situs resmi Jaringan Islam Liberal,⁴⁰ serta beberapa buku lain yang penyusun cari dalam proses penelitian ini.

3. Analisa Data

Jika data telah terkumpul, akan dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan interpretatif.⁴¹

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-historis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan cara mengetahui dan menyelidiki dari aspek sosial kehidupan masyarakat tertentu, sehingga akan terjawab atau diketahui akar persoalan yang dimaksud dalam kajian ini. Sedangkan penelitian historis adalah suatu

³⁷ Taqiuddin an-Nabhani, *Concepts of Hizb ut-Tahrir* (London: Khilafah Publications, 2008)

³⁸ Taqiudin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, Terj. Zakaria, dkk (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

³⁹ Denny J. A, *Sebuah Teologi Untuk Negara Sekuler* dalam Luthfi Assyaukani, *Wajah Liberal*.

⁴⁰ www.islamlib.com.

⁴¹ Deduksi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan interpretative artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera orang yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Dengan instrument diatas, diuraikan pandangan masing-masing tokoh tersebut lebih dahulu, lalu dicari motode pendekatan dan substansi pemikirannya. Lihat Sudarto, *Metode...*, hlm. 42-43.

proses pendekatan terhadap suatu masalah tersebut yang meliputi pengumpulan dan interpretasi terhadap peristiwa atau gagasan yang muncul di masa lampau, untuk kemudian menjawab persoalan di dalam penelitian ini.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, Tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengeksplorasi tentang pengertian, sejarah dan lahirnya sekularisme, dan respon intelektual Islam terhadap wacana negara sekuler. Hal ini bermaksud untuk memberikan gambaran umum tentang negara sekuler dan tradisi pemikiran Islam yang biasanya dijadikan landasan dalam perdebatan. Pada bab ini penyusun mengkhususkan pembahasan negara sekuler dan relevansinya terhadap agama beserta realitas sosial yang melingkapinya, dan tidak membahas mengenai konsep Negara dalam arti luas. Karena kedekatan Negara dengan agama terutama Islam selalu menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya.

Selanjutnya pada bab ketiga, memuat tentang latar belakang sosial dan sejarah pemikiran JIL dan HTI beserta pemahamannya tentang negara sekuler. Kemudian dilanjutkan dengan bab empat, penyusun menganalisis dan

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reneka Cipta, 1993), hlm. 202.

mengkomparasikan antara pemikiran JIL dan HTI mengenai pandangannya tentang negara sekuler, metode yang digunakan, substansi pemikiran, dasar-dasar argumentasi dan tipologi pemikiran keduanya. Sedangkan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam perspektif antara Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir tentang negara sekuler memiliki persamaan-persamaan dan perbedaan. Walaupun secara historis mereka lahir di dalam tubuh agama Islam sendiri.

Dalam perspektif Jaringan Islam Liberal, Negara sekuler merupakan sebuah konsep baru dalam berbangsa dan bernegara yang mengidealkan pemisahan antara agama dan sistem kenegaraan. Hal inilah yang menurut beberapa tokoh Jaringan Islam Liberal merupakan era baru pemikiran Islam Indonesia yang jauh lebih maju dari pada pemikiran tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Sedangkan menurut Hizbut Tahrir, gagasan tentang Negara sekuler merupakan salah satu bentuk deideologisasi pemikiran Islam secara besar-besaran, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mengedepankan kebebasan berfikir manusia tanpa batas. Ide pemikiran tentang Negara sekuler juga dianggap oleh Hizbut Tahrir sebagai ide kufur. Yang berarti melaksanakan sistem ini merupakan melaksanakan sistem kufur. Menyeru sistem ini berarti mempropagandakan sistem kufur. Oleh karena itu tidak boleh mengembangkan atau mengambil sistem tersebut dengan alasan dan dalam kondisi apapun.

Kerangka pemikiran dan ideologi Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir telah tersebar keseluruhan penjuru dunia. Khususnya di Indonsia, perkembangan pemikiran keduanya memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap generasi muda sekarang. Baik dalam intitusi akademik atau non formal. Pada dasarnya pemikiran-pemikiran keislaman di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup massif. Hal ini dibuktikan bahwa pada ranah akademik wacana tentang negara sekuler serta hubungannya dengan agama sampai saat ini masih menjadi perdebatan yang tiada habisnya.

Kontroversi pemikiran tentang Negara sekuler yang muncul dengan sangat populer telah menimbulkan implikasi dan polemik besar yang cukup berkepanjangan di kalangan intelektual Muslim dan para pengagás pembangunan Islam. Akibat polemik tersebut muncul dua kelompok dikotomis dengan sederetan tokoh intelektual pendukungnya. Kelompok pertama, suatu kelompok yang menentang keras sekularisasi yang dianggap identik dengan sekularisme. Kelompok kedua, suatu kelompok yang menolak sekularisme sebagai suatu paham tertutup yang anti agama. Menurut kelompok reformis ini, sekularisasi diartikan sebagai upaya pembebasan masyarakat dari kehidupan magis dan tahayyul dengan melakukan desakralisasi alam.

Di kancalah perdebatan politik ideologi diantara berbagai aliran dan gerakan, sebagian mereka mengungkapkan masalah ini dengan ungkapan “pemisahan agama dari negara,” satu ungkapan yang tidak pas bagi masyarakat Islam karena upaya untuk mempertentangkan agama dan negara

dalam Islam ini tidak dapat dimengerti kecuali jika ada lembaga tertentu yang mengendalikan masalah-masalah agama dan mengklaim hak bagi dirinya untuk menjalankan kekeuasaan ruhani terhadap manusia, untuk dibedakan dari kekuasaan temporal yang dijalankan oleh lembaga politik Negara.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan:

1. Pembahasan tentang wacana keislaman dan kenegaraan bukan perkara yang mudah sehingga perlu adanya dialektika khusus pada wilayah akademik.
2. Berkenaan dengan pembahasan, penelitian ini sebatas pada perspektif dan pandangan antara Jaringan Islam Liberal dan Hizbut Tahrir saja sehingga harapan penyusun selayaknya perlu adanya penelitian lagi pada ranah konsep dan gagasan secara khusus.
3. Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengharapkan masukan dan kritik dari pihak manapun demi perbaikan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini, serta bisa dilanjutkan dalam diskursus yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Syaamil Cipta Media, t.t.

B. Fiqh dan Uṣul Fiqh

Effendy, Bahtiar. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, *Qawa'id Nizham Al Hukm fi Al Islam*, Kuwait: Darul Buhuts Al Ilmiyah, 1980.

M. Sayid Al-Musayyar, *Ushul al-Nashraniyyah fi al-Mizan*, t. penerbit, Kairo, h. 120

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta Paramadina, 1992.

Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keiindonesiaan*, Bandung; Mizan, 1989.

Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius, Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 2000.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.

Usmuni, Muhammad Abdul Mujib. *Al-Qowā 'Idul Fiqhīyah*, Rembang: Ma'had Raudhatut Thalibin, t.t.

C. Lain-Lain.

“Islam Vs Secularism”, Al Jumuah, [The Friday Report], vol III, no. 10, <http://www.islaam.com>.

A Concise History of France (New York: Cambridge University Press, 2005)
bab Medieval And Early Modern, Lynn Schler, History the Nation-State, and Alternative Narratives: An Example from Colonial Douala, NY: African Studies Review, 2005.

A. Syaifullah (Pen.), *Mengenal Hizbut Tahrir*.

Abdul Moqsith Ghazali (Ed.), *Ulil Abshar Abdalla: Menjadi Muslim Liberal*, Jakarta: Nalar, 2005.

- Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, Penerjemah Ali Noerzaman, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2004.
- Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, Jakarta: GIP 2005.
- Ahmad Adaby Daeban, "Sebuah Pendekatan Sejarah Struktural dan Relevansinya untuk sejarah Nasional," Makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV di Yogyakarta, 16-19 Desember 1985 Yang Diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Investasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta.
- Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Airlangga Pribadi dan M. Yudhie R. Haryono, *Post Islam Liberal: Membangun Dentuman. Mentradirikan Eksperimentasi*, Bandung ; Gugus Press, 2002.
- Alfons Taryadi, *Epistemologi Pemecahan Masalah menurut Karl R. Popper*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Ali Syu'aibi, *Sayyid Quthub, Biang terorisme, Pengkafiran dan Pertumpahan Darah*, terj. Muhtaram Jakarta: Pustaka Azhari, 2004.
- Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Loc. Cit.
- Anwar, Syafi'i, kata pengantar buku Abdurrahman Wahid "Islamku, Islam Anda,Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi." Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. XII, 2000.
- Ash-shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. I, 1996.
- Azzam Tamimi, John Esposito, *Islam and Secularism in The Midle East*, New York, 2000, P.14.
- Basir, Faisal, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XX, Jakarta: Gramedia, 1999.

- Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Denny J. A, *Sebuah Teologi Untuk Negara Sekuler* dalam Luthfie Asyaukani, *Wajah Liberal*.
- Documents of American History (Virginia: Virginia Department of Education, 1999), bab declaration Of American Independents.
- Effendy, Bahtiar. "Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Di Indonesia" dalam *Prisma* No. 5 Tahun XXIV Mei 1995.
- Eric S. Waterhouse, "Secularism", *Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. XI*, New York: Charles Sribner's Sons Sons, 1921.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gerhart Raichle, *Asas-Asas Kebijakan Sosial Liberal*, Potsdam, Friedrich-Naumann-Stiftung, 1999.
- Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*, Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, 5 Jilid*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hizbut Tahrir Indonesia, *Kritik Islam Terhadap UUD 1945 dan Rancangan UUD Islam*, Jakarta; HTI, 2000.
- Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, ter. Abu Afif dan Nur Khalish, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2000.
- John L. Esposito, *Ancaman Islam Mitos atau Realitas*, Bandung; Mizan, 1996.
- John L. Esposito, *Ancaman Islam, Mitos atau realitas*, terj: alwiyah Abdurrahman dan MISSI, Bandung; Mizan, 1994.
- Kamaruzzaman Bustaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatera, 2001.
- Kamus al-Asri* Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krupyak, 1998.

- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, cet. II, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Khamami Zada dan Arif R. Arafah, “Diskursus Politik Islam” Jakarta; LSIP, 2004, Taqiyuddin an-Nabhani, *Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir*, terj. Abu Afif, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 1993.
- Larry E. Shinner, “*The Concept of Secularization in Empirical Research*”, dalam William M. Newman, *The Social Meanings of Religion*, Chicago: Rand McNally College Publishing Company, 1974.
- Leonard Binder, *Islamic Liberalism, A critique of Development Ideologies*, The University of Chicago Press, 1998), (ter.) Imam Muttaqin, *Islam Liberal; Kritik terhadap Ideologi-ideologi Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Luke Ebersol, Dunyoi, Urfi, terjemahan Majidi, *Farhangge Ulume Ijtimo’I, Teheran*, Cetakan Pertama, 1376.
- M. Imam Aziz, “Moral Force,” ARENA No. 9, Th. X Januari 1985
- M. Solly Lubis, S. H. ”*Ilmu Negara*”, Bandung: ALUMNI, 1981.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, alih bahasa Satrio Wahono, dkk, cet II, Jakarta: Serambi, 2005.
- Michael S. Northcott, “Pendekatan Sosiologis”, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, alih bahasa Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam, Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: UI Press, 1983.
- Muhammad Abed al-Jabiri, al-Taqwin al-‘Aql al-‘Arabi, Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah, 1990.
- Munawir Sadzjali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Novia Anggarini, “Bentuk Pemerintahan Hizbut Tahrir”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga 2000.
- Rustum E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan IPTEK*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Shawn C. Knight, A Short History of Egypt, Part III: The New Kingdom and its Aftermath, Pittsburgh: Carnegie Mellon University Press, 2009, bab The Early Eighteenth Dynasty.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. II, 1998.

Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1986

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Syaikh ali Tanthowi, *Fatwa-fatwa Ali Tanthowi*, Solo: Era Inter Media, 1998.

Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis, Pengalaman Hizbut Tahrir Indonesia*, Malang: UMM Press, 2005.

Taqiudin An-Nabhani, *Concepts of Hizbut Tahrir*, London: Khilafah Publication, 2008.

Taqiudin An-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam, Terj. Zakaria, dkk* Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, Al-Quds; Hizbut Tahrir, 1953.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamul Islam*, 2001.

W.S.F Pickering, “Secularization” in, *The Black Well Encyclopedia of Modern Christian thought*, ed. By Alister E. McGrath, 1993, P.593.

Situs Jaringan Islam Liberal (Islamlib.com)

<http://habib-dk.blogspot.com/2009/04/negara-sekuler.html>,

[http://pwkpersis.wordpress.com/2008/03/28/sekilas-tentangsekularisme/ ftn6](http://pwkpersis.wordpress.com/2008/03/28/sekilas-tentangsekularisme/),

[http://pwkpersis.wordpress.com/2008/05/03/menimbangpolitiksekuler/ ftnre3](http://pwkpersis.wordpress.com/2008/05/03/menimbangpolitiksekuler/)

<http://www.futureofmuslimworld.com/research/detail/the-crisis-of-the-arab>

www.en.wikipedia.org/wiki/secularism

CURRICULUM VITAE

Nama : Abdul Basith
NIM : 02361693
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 18 Januari 1983
Alamat Rumah : YPI el-Faraby Prambon
Alamat Yogyakarta : Jl. Mutiara No. 30 Blok F Pengok PJKA Pengok
HP : 081553055505

Orang Tua :

- Ayah : H. A. Zakaria
- Ibu : Hj. Siti Halimah

Pendidikan :

- TK Perjuangan Lulus Tahun 1990
- MI El-Faraby Lulus Tahun 1996
- MTs El-Faraby Lulus Tahun 1999
- MAN Denanyar Jombang Lulus Tahun 2002.
- Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.